

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Konsekuensi hukum pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03152/Kel. Palmerah dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Putusan: 96/G/2024/PTUN.JKT adalah sebagai berikut :**
 - a. Pemulihan Hak atas tanah, tanah yang menjadi subjek sengketa dikembalikan ke status asal yakni sebagai bagian dari HBG milik PT. Unota Persada Jaya
 - b. Ganti rugi dan Rehabilitas dalam Peradilan Tata usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

- 2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 96/G/2024/PTUN Jakarta tentang Pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03152/Kel.Palmerah adalah sebagai berikut :**
 - a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Pemerintahan, Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan.
 - b. Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, tindakan Tergugat melanggar beberapa AAUPB yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan.

B. Saran

- a. Agar Majelis Hakim dalam mengambil Putusan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak.
- b. Agar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) meningkatkan transparansi dalam proses penerbitan sertifikat tanah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta Padang .

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

S.F Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1997, *Metode Research*, Andy Offset, Yogyakarta.

Supatra Nata, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta.

Victor Yaved Neno, 2006, *Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Cotra Widya Bakti, Jakarta.

Wijaya. S, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas
tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

C. Sumber Lain

Arifin Bur, Desi Apriani, 2017 ” Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat
Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”,
Uir Law Review, Volume 01, Nomor 02

Anastasya Millenia Tuela, Toar N.Palilingan, Firits M. Dapu,”Kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa
Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat TUN”
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/45629/40989> di akses 20 Oktober 2024.

Giandiva Fahlika Erizal, 2023, “Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Yang
Stelsel Negatif Bersendikan Positif Pada Objek Tanah Yanag Telah
Terdaftar Di Kantor Pertanahan”, *Jurnal Notarius*, Vol.2, No.1,
Januari-Juni 2023.

I Gde Pantja Astawa, 2014, ” Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis
Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur
Hukum Perdata” *Jurnal Litigasi*, Volume 25 Nomor 2, Oktober 2024.

Indri Hadisiswati, 2014, ”Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas
Tanah”, *Ahkam:Jurnal Hukum Islam* 2.no.1 (2014): 118-146.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara “Mengenal
Lebih Dekat Tentang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)”
<http://jdih.barito-utarakab.go.id/berita/baca/mengenal-lebih-dekat->

tentang-ptun-pengadilan-tata-usaha-negara-diakses pada 5 November 2024

Medcom, "Syarat dan Tata Cara Gugat Sertifikat Tanah", <https://www.medcomid-properti.id/-tips-/properti/0k-8BLDWN-syarat-dan-tata-cara-gugat-sertifikat.tanah>, di akses 1 februari 2025

Muhammad Kamil Akbar, 2021," Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik ", *Jurnal Dharmasisya*, Volume 1, 2021

Sip law firm, "Proses Penerbitan dan Pembatalan Sertifikat Tanah: Kepastian Hukum dan Jalur Penyelesaiannya", <https://siplawfirm.id/pembatalan-sertifikat-tanah/?lang=id> di akses 10 Januari 2025.

Suripto, 2016, "Analisis Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Politik", *Jurnal Politikologi*, Volume 3 No.1, Oktober 2016.

Putusan PTUN Jakarta Nomor : 96/G/2024/PTUN.JKT tentang Pencabutan Hak Milik Nomor : 03152/Kel.Palmerah.

UKM Indonesia, 2022, " Dampak (*Impact*)" <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/dampak-impact->, diakses pada 17 Maret 2025.

Wikipedia, " Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia", https://id-wikipedia/wiki-Kementrian-Agraria-dan-Tata.Ruang-Badan_Pertanahan_-_Nasional_Republik_Indonesia, di akses 1 Februari 2025